



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

MENAKAR DAMPAK EFISIENSI ANGGARAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL DAN DAERAH

**20
25**

**ANALISIS
RINGKAS
CEPAT**



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab:

Dr. Aulia Sofyan, S.Sos., M.Si.

Penulis:

Dwi Resti Pratiwi, S.T., MPM.

Faqih Nur Huda, S.E., CP. NLP

Orlando Raka Bestianta, S.E., CLD

**20
25**

**ANALISIS
RINGKAS
CEPAT**

I. Pendahuluan

Perekonomian global menghadapi ketidakpastian tinggi akibat perlambatan mitra dagang utama, ketegangan geopolitik, serta dampak perubahan iklim pada sektor energi dan pangan. Di dalam negeri, tantangan fiskal meliputi meningkatnya beban utang dan kebutuhan alokasi anggaran yang lebih efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sebagai respons, pemerintah menerbitkan Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD, menargetkan penghematan Rp306,69 triliun. Efisiensi ini mencakup pemangkasan belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, termasuk Kementerian PUPR (Rp81,38 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp17,87 triliun), dan Kementerian Kesehatan (Rp19,6 triliun), serta pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp50,59 triliun (DPR RI, 2025).

Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan belanja negara untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penyertaan modal ke BPI Danantara. Namun, pemangkasan anggaran besar berisiko memperlambat proyek strategis, menurunkan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperburuk ketimpangan fiskal antarwilayah.

Dalam konteks ini, diperlukan analisis menyeluruh terkait dampak efisiensi anggaran terhadap perekonomian nasional dan daerah, tantangan yang muncul, serta strategi mitigasi untuk meminimalkan risiko dan memastikan efektivitas belanja negara dalam mendukung pembangunan.

II. Analisis Dampak Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran bertujuan meningkatkan efektivitas belanja dan stabilitas fiskal. Namun, pemotongan pada sektor strategis seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi, menekan daya beli, serta meningkatkan risiko fiskal. Analisis ini menguraikan dampaknya terhadap ekonomi makro, sektor utama, dan transfer ke daerah.

1. Potensi Dampak terhadap Ekonomi Makro dan Stabilitas Fiskal

a. Pertumbuhan Ekonomi Diprediksi Melambat

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, terutama yang menyasar sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memiliki implikasi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemotongan anggaran pada sektor-sektor vital ini dapat menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yaitu 5,3% pada tahun 2025 hingga 8% pada tahun 2029. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan Celios (2025), jika belanja pemerintah mengalami pengurangan signifikan, maka konsumsi masyarakat yang selama ini didorong oleh kebijakan fiskal juga akan terdampak. Dengan kondisi ini, pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah bisa mengalami perlambatan dan bahkan sulit mencapai angka lima persen sebagaimana yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Dampak dari kebijakan ini mulai terlihat dalam berbagai indikator ekonomi, salah satunya adalah tingkat optimisme masyarakat terhadap prospek perekonomian nasional. Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia pada Februari 2025, Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) tercatat sebesar 138,7, menunjukkan optimisme yang masih kuat terhadap kondisi ekonomi ke depan. Namun, angka ini mengalami sedikit penurunan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 140,8. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun keyakinan konsumen masih berada di zona optimis, terdapat kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat mengenai prospek ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Tren ini perlu dicermati lebih lanjut, terutama dalam kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran yang tengah berjalan.

b. Daya beli Masyarakat Melemah

Efisiensi anggaran yang tidak tepat sasaran berisiko menekan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Pemotongan belanja negara, khususnya pada sektor-sektor yang menopang aktivitas ekonomi, dapat menyebabkan penurunan permintaan domestik. Menurut analisis Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), konsumsi rumah tangga diperkirakan mengalami kontraksi sebesar 0,814% akibat kebijakan efisiensi anggaran tersebut (Simanjuntak 2025).

Penurunan konsumsi ini berkontribusi terhadap tren deflasi yang terjadi selama dua bulan berturut-turut pada awal 2025, dengan deflasi tercatat sebesar 0,76% (mtm) pada Januari dan 0,48% (mtm) pada Februari. Fasial dalam Primantoro (2025) menyebutkan bahwa deflasi ini mencerminkan melemahnya permintaan domestik dan daya beli masyarakat. Bahkan, anomali terjadi pada tahun ini, di mana menjelang Ramadhan yang biasanya ditandai dengan lonjakan inflasi, justru tercatat deflasi sebesar 0,9 (yoy) pada Februari 2025. Padahal, dalam lima tahun terakhir, periode menjelang Ramadhan selalu mengalami inflasi yang mencerminkan peningkatan konsumsi masyarakat. (Gambar 1) Situasi ini mengindikasikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran memiliki dampak langsung terhadap pola konsumsi dan stabilitas ekonomi nasional.

Gambar 1. Inflasi Menjelang Ramadhan (yoy,%)



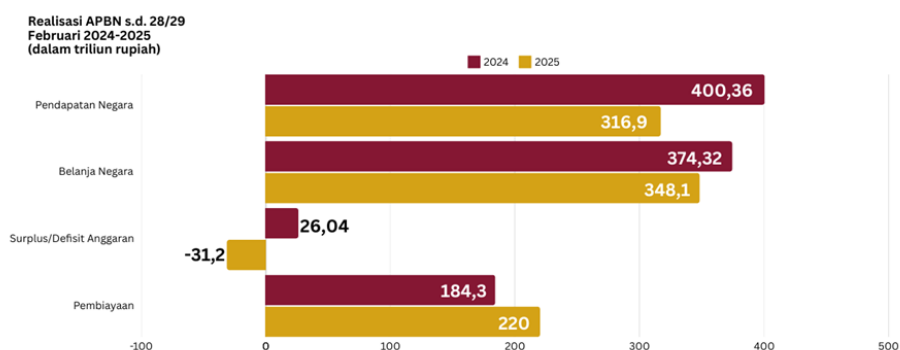
Sumber : BPS, 2025

c. Terjadi Anomali Defisit Anggaran di Awal Tahun dan Penurunan Persepsi Investor

Pemotongan anggaran yang signifikan dapat menghambat program-program pembangunan strategis yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi melambat, penerimaan negara berisiko menurun, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan melalui utang guna menutupi defisit anggaran. Kondisi ini dapat berdampak pada rasio utang terhadap PDB, yang turut mempengaruhi persepsi investor serta peringkat kredit negara.

Salah satu indikasi awal dampak efisiensi anggaran terhadap stabilitas fiskal terlihat dari anomali defisit APBN pada awal tahun 2025. Biasanya, di awal tahun, APBN mencatat surplus karena realisasi belanja yang cenderung lebih lambat dibandingkan dengan penerimaan negara. Namun, pada Februari 2025, defisit anggaran mencapai Rp31,2 triliun, berbeda dengan periode yang sama di tahun 2024 yang justru mencatat surplus Rp26,04 triliun. Penurunan pendapatan negara yang cukup signifikan, dari Rp400,36 triliun pada 2024 menjadi Rp316,9 triliun pada 2025, menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya defisit lebih awal. Sementara itu, belanja negara juga mengalami kontraksi dari Rp374,32 triliun pada 2024 menjadi Rp348,1 triliun pada 2025, tetapi tidak cukup untuk menutupi penurunan penerimaan. (Gambar 2)

Gambar 2. Perbandingan Realisasi APBN Tahun 2024 dan 2025



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Perubahan tren ini dapat menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor terkait kredibilitas fiskal Indonesia, terutama jika defisit terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan laporan MSCI Indonesia Index per 28 Februari 2025, kinerja pasar modal Indonesia mengalami penurunan signifikan dibanding indeks pasar berkembang lainnya. Berikut adalah beberapa temuan utama dari laporan tersebut:

- MSCI Indonesia Index mengalami penurunan sebesar -28,53% dalam satu tahun terakhir dan -16,70% sejak awal tahun (YTD).
- Sebagai perbandingan, MSCI Emerging Markets mengalami kenaikan 10,07% dalam satu tahun terakhir. Ini menunjukkan bahwa pasar saham Indonesia mengalami performa yang lebih lemah dibandingkan indeks pasar berkembang dan global.

- Faktor seperti efisiensi anggaran pemerintah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan volatilitas rupiah berkontribusi terhadap ketidakpastian di pasar.

MSCI Indonesia Index menunjukkan tren bearish dengan pelemahan signifikan dibandingkan indeks pasar berkembang lainnya. Sentimen investor masih cenderung negatif, dan perlu adanya kebijakan yang lebih jelas untuk mendorong pemulihan pasar modal Indonesia.

2. Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Beberapa Sektor Strategis

Efisiensi anggaran berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029, khususnya di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Pemangkasan anggaran dapat memperlambat penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN), menurunkan kualitas serta akses layanan pendidikan, dan membatasi penyediaan fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan dampak serta perumusan strategi mitigasi agar kebijakan efisiensi anggaran tetap selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

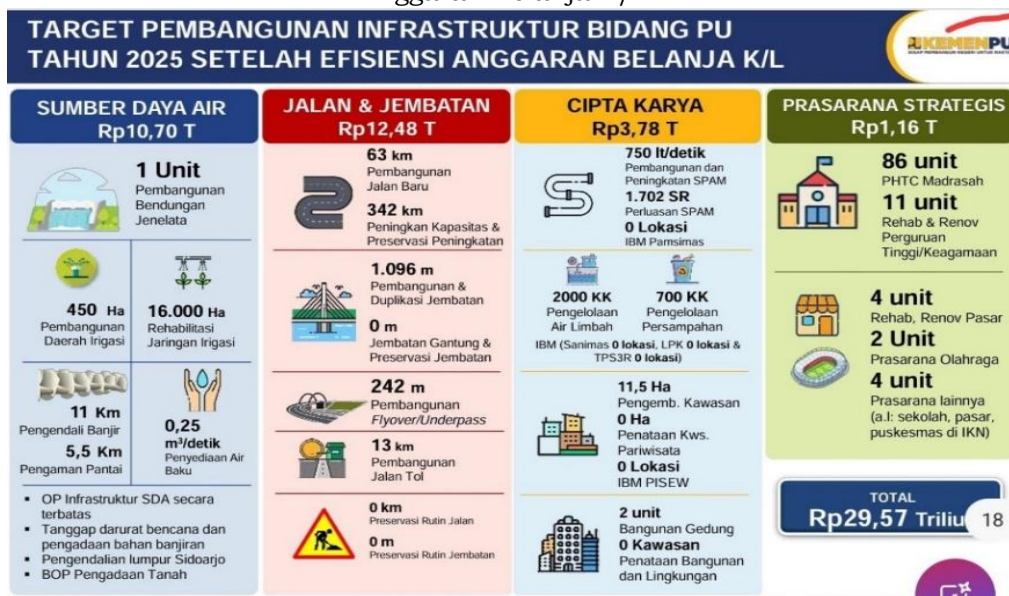
a. Sektor Infrastruktur

Efisiensi anggaran pada sektor infrastruktur berpotensi memperlambat realisasi proyek-proyek pembangunan strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Akibatnya, konektivitas antarwilayah menurun, distribusi barang dan jasa menjadi terhambat, serta daya tarik investasi regional berkurang. Pengurangan belanja infrastruktur berisiko memperlambat pembangunan ekonomi dan menurunkan daya saing Indonesia (INDEF, 2025). Industri konstruksi, yang selama ini bergantung pada proyek infrastruktur pemerintah, juga berisiko mengalami perlambatan (Miradina, 2025).

Pada RPJMN 2025-2029, Pemerintah menetapkan 77 Proyek Strategis Nasional, 48 merupakan *carry over*, sementara 29 merupakan PSN baru. Pada PSN tersebut, Kementerian PU mendapatkan tugas untuk menjalankan 10 PSN *carry over* dan 2 PSN baru. Awalnya, Kementerian PU mengalami efisiensi anggaran belanja mencapai Rp81,38 triliun dari pagu Rp110,95 triliun atau mengalami efisiensi 71,35%, yang berdampak pada:

- Keberlanjutan PSN yang hanya pada pembangunan 1 Bendungan Jenelata di Sulawesi Selatan, meskipun Bendungan Jenelata tidak masuk dalam PSN pada RPJMN 2025-2029.
- Preservasi rutin jalan dan preservasi rutin jembatan tidak bisa dilaksanakan (Kementerian PU, 2025)

Gambar 3. Target Pembangunan Infrastruktur Bidang PU Tahun 2025 Setelah Efisiensi Anggaran Belanja K/L



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2025

Setelah rekonstruksi anggaran, efisiensi berkurang menjadi Rp60,46 triliun, sehingga pagu baru Kementerian PU menjadi Rp50,48 triliun. Dengan revisi ini, maka alokasi anggaran menjadi sebagai berikut:

- Tersedia Rp1,8 triliun untuk 8.000 titik Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI).
- Tersedia Rp700 miliar untuk 1.025 titik proyek Cipta Karya, yang merupakan program padat karya tunai (PKT).
- Kelanjutan pembangunan 15 bendungan lainnya, termasuk 4 PSN 2025-2029.
- Anggaran preservasi jalan dan jembatan hanya cukup untuk 6 bulan pertama tahun 2025 (Kementerian Pekerjaan Umum, 2025).

b. Sektor Pendidikan

Efisiensi anggaran pendidikan berisiko menurunkan kualitas pendidikan secara umum. Sebelum efisiensi, anggaran pendidikan pada kementerian/lembaga sebesar Rp 261 triliun atau kedua tertinggi setelah anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah daerah sekitar Rp 297 triliun. Adapun anggaran Kemendikdasmen sekitar Rp 33,5 triliun, Kemdiktisaintek sebesar Rp 57 triliun, dan Kemenag Rp 65,9 triliun. Pemangkasan dana dapat menyebabkan tertundanya pembangunan atau perbaikan fasilitas pendidikan, keterbatasan akses terhadap alat dan media pembelajaran yang modern, serta tertundanya peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru. Efeknya adalah penurunan daya saing sumber daya manusia dan meningkatnya ketimpangan pendidikan antarwilayah. Selain itu, jika anggaran penelitian di perguruan tinggi dikurangi, berisiko pada penurunan daya saing Indonesia di bidang inovasi dan teknologi. Padahal, inovasi adalah pendorong utama kemajuan ekonomi. Tanpa riset dan pengembangan, Indonesia berpotensi tertinggal dalam persaingan industri, teknologi serta sektor strategis seperti energi terbarukan dan manufaktur.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengungkapkan lima dampak pemangkasan anggaran di sektor pendidikan, yaitu: 1) penurunan kualitas pendidikan; 2) bertambahnya Angka Putus Sekolah; 3) sulitnya akses pendidikan di daerah; 4) pemecatan guru honorer secara massa; dan 5) ketimpangan pendidikan (Yaputra, 2025).

a) Dampak pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalami efisiensi anggaran belanja sebesar Rp7,23 triliun dari pagu Rp33,5 triliun atau mengalami efisiensi 21,6% sehingga menjadi Rp26,27 triliun. Efisiensi ini berdampak pada berbagai program prioritas, dengan beberapa program tidak dapat didanai sepenuhnya dan beberapa lainnya hanya mendapatkan alokasi terbatas. (Tabel 1)

Tabel 1. Dampak Efisiensi Anggaran TA 2025 pada Kemendikdasmen

No.	Dampak	Keterangan
1.	Program Prioritas Tidak Terdanai	Bantuan sertifikasi kompetensi siswa SMK
2	Program Prioritas Didanai Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Program penataan guru dan tenaga kependidikan • Peningkatan keterampilan dan penyegaran keterampilan • Pengembangan talenta dan prestasi, termasuk pelaksanaan lomba nasional dan internasional Akreditasi satuan pendidikan • Pembiayaan tuisi reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian, termasuk penyusunan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) • Bantuan SMK-PK (Pusat Keunggulan)
3.	Kurikulum dan Pembelajaran	Pengembangan model kurikulum dan pembelajaran, utamanya terkait koding, kecerdasan artifisial, dan pembelajaran mendalam (<i>deep learning</i>) tidak dapat dilaksanakan secara optimal sehingga akan berdampak pada proses efektivitas pembelajaran.
4.	Bantuan pemerintah	Pengurangan jumlah sasaran penerima bantuan pendidikan
5.	Penyusunan kajian, model pembelajaran, dan sistem perbukuan	Tidak mencapai sasaran optimal.

Sumber: Kemendikdasmen, 2025

Berikut beberapa program terdampak dari efisiensi anggaran di Kemendikdasmen:

- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Program ini memperoleh pemangkasan anggaran paling signifikan, yaitu sebesar Rp1,063 triliun dari pagu sebesar Rp1,195 triliun sehingga menjadi Rp132,410 miliar. Dampak signifikan dari pengurangan anggaran ini adalah peningkatan potensi pengangguran lulusan SMK, yang selama ini bergantung pada pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Agustus 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan SMK mencapai 9,01%, tertinggi dibandingkan dengan jenjang pendidikan lainnya (SMA: 7,05%; diploma IV, S1, S2, S3:

5,25%; Diploma I/II/III: 4,84%; SMP: 4,11%, SD ke bawah: 2,32%). Dengan berkurangnya dukungan untuk pendidikan vokasi, tren pengangguran di kalangan lulusan SMK berisiko semakin meningkat.

- Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Sebagai bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau *Quick Win Programs* tahun 2025, pemerintah merencanakan revitalisasi sarana dan prasarana sekolah. Program ini menjadi bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029. Awalnya, pemerintah menargetkan renovasi 22.000 sekolah dengan anggaran Rp20 triliun (Kementerian Keuangan, 2025), namun setelah efisiensi anggaran berdampak pada:

- Pengurangan target renovasi menjadi 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah.
- Anggaran disesuaikan menjadi Rp17,1 triliun.
- Tanggung jawab proyek yang semula dibagi antara Kementerian PU dan Kemendikdasmen kini dikonsolidasikan di bawah Kemendikdasmen.

Namun, hingga saat ini, pelaksanaan program masih menunggu pembahasan Inpres, sehingga terdapat potensi keterlambatan dalam implementasi. Sebagai informasi, mengacu Neraca Pendidikan Daerah (NPD) 2023, jumlah ruang kelas sekolah dengan kondisi rusak berat meliputi: PAUD (12.000), SD (121.000), SMP (27.000), SMA (10.000), SMK (5.000), dan SLB (1.000) (NDP, 2023). Jika dihitung seluruh sekolah di Indonesia yang mengalami rusak berat, sedang, dan ringan, jumlahnya bisa mencapai 40-50%.

b) Dampak Pada Pendidikan Tinggi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) mengalami efisiensi Rp14,3 triliun dari target awal sebesar Rp22,5 triliun sehingga menjadi Rp57,7 triliun. Salah satu yang menjadi perhatian publik ialah imbas kenaikan UKT akibat efisiensi tersebut. Namun, Pemerintah melalui Menteri Keuangan melarang PTN untuk menaikkan UKT untuk Tahun Ajaran 2025/2026.

Beberapa PTN, baik PTN-BH maupun PTN Satker di bawah Kemdiktisaintek telah melakukan penyesuaian, di antaranya berhenti berlangganan jurnal internasional, melakukan perkuliahan secara daring, pembatasan penggunaan listrik, dll. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) menyatakan bahwa walaupun ada pengurangan efisiensi, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) (bantuan biaya yang berguna untuk mengatasi gap antara uang kuliah tunggal (UKT) dan biaya kuliah tunggal (BKT) masih terdampak, hanya bisa menutup 50% gap antara UKT dan BKT (Nurhidayat, 2025).

Di luar PTN, terdapat Perguruan Tinggi Kedinasan dan Lembaga (PTKL) di bawah kementerian/lembaga non-Kemdiktisaintek dan Kementerian Agama. Beberapa PTKL membuka program studi umum yang tumpang tindih dengan PTN, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi penggunaan anggaran. Beberapa temuan terkait PTKL meliputi:

- Biaya operasional PTKL dinilai lebih mahal dibandingkan PTN, dengan rasio 13,8 kali lebih besar dibandingkan PTN di bawah Kemdiktisaintek.
- Dari 124 PTKL yang ada, hanya 15 perguruan tinggi benar-benar murni kedinasan, sementara 87 PTKL menyelenggarakan pendidikan nonkedinasan dan 22 PTKL merupakan campuran kedinasan dan nonkedinasan. (Kompas, 2025).

c. Sektor Kesehatan

Kementerian Kesehatan mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp19,6 triliun dari total pagu Rp105,6 triliun, sehingga anggaran yang tersisa menjadi Rp86,1 triliun. Efisiensi ini berdampak pada beberapa aspek layanan kesehatan, antara lain:

- Penurunan fasilitas dan peralatan medis, yang berisiko menurunkan kualitas layanan kesehatan dasar dan spesialis.
- Sulitnya ekspansi layanan ke wilayah terpencil sehingga dapat memperlebar kesenjangan akses kesehatan antarwilayah.
- Pengurangan pengadaan obat dan vaksin, yang sebelumnya dianggarkan untuk 12 bulan kini hanya cukup untuk 10 bulan (Zahro, 2025).
- Potensi kegagalan mencapai target pembangunan kesehatan nasional, akibat keterbatasan dana untuk program prioritas.

Dampak Efisiensi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di sektor kesehatan

Di sektor kesehatan, terdapat tiga Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam RPJMN 2025-2029, yaitu:

- Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten/kota.
- Program penuntasan Tuberkulosis (TBC).
- Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG).

Pembangunan rumah sakit dilakukan dengan meningkatkan kelas RSUD tipe D menjadi tipe C, yang mencakup pembangunan gedung baru dan peningkatan sarana serta prasarana kesehatan. Sejumlah RSUD telah memulai pembangunan, di antaranya: RSUD Reda Bolo di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur; RSUD Pongtiku di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan dan RSUD Bobong di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara. Secara keseluruhan, Kementerian Kesehatan menargetkan pembangunan atau peningkatan 66 RSUD di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan, dengan rincian:

- 32 RSUD ditargetkan selesai pada 2025.
- 34 RSUD tambahan akan dibangun pada 2026 (Kementerian Kesehatan, 2025).

Pada program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), awalnya, Menteri Kesehatan menyatakan bahwa anggaran untuk PKG sebesar Rp4,7 triliun pada 10 Februari 2025, namun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 16 Maret 2025 mengungkapkan bahwa anggaran untuk PKG dialokasikan melalui Kementerian Kesehatan sebesar Rp 2,2 triliun, dan melalui dana alokasi khusus (DAK) non-fisik sejumlah Rp 1,2 triliun, sehingga menurun menjadi Rp3,4 triliun. Kemenkes mencatat bahwa hingga 16 Maret 2025, program PKG telah menarik lebih dari 777 ribu pendaftar dari 9.285 Puskesmas di 502 kabupaten/kota dan 38 provinsi di seluruh Indonesia (ibid). Dengan adanya efisiensi di sektor kesehatan ini, berpotensi pada tidak optimalnya pelayanan kesehatan dan capaian target pembangunan kesehatan.

3. Dampak Pemangkasan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) terhadap Keuangan dan Pembangunan Daerah

Pemangkasan anggaran TKD sebesar Rp50,59 triliun dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 membawa konsekuensi serius bagi kemampuan fiskal pemerintah daerah. Pemotongan terbesar terjadi pada Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Umum, serta Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (Tabel 2). Dengan berkurangnya dana ini, pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam membiayai program prioritas, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, beberapa daerah yang sangat bergantung pada TKD hingga 70% dari total APBD akan mengalami keterbatasan dalam membiayai layanan publik. Hal ini berisiko meningkatkan utang daerah dan memperburuk kondisi ekonomi lokal, terutama di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

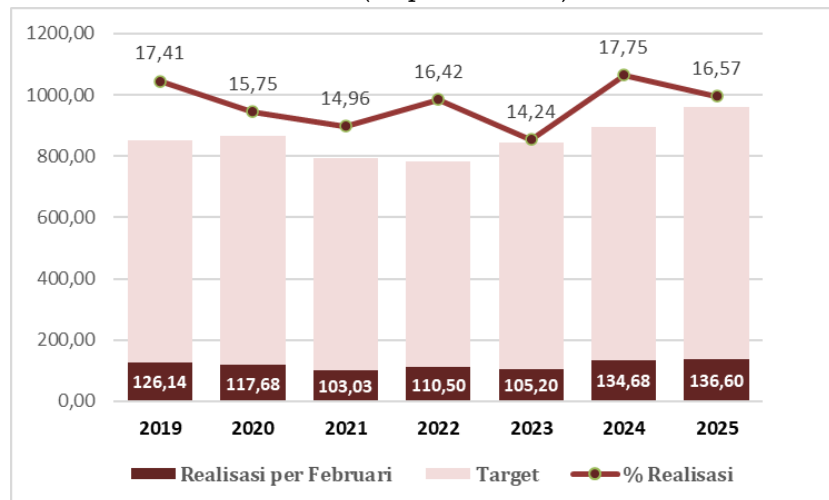
Tabel 2. Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah

Jenis Anggaran	Anggaran Dipangkas (Rp Triliun)
Kurang Bayar DBH	13,9
Dana Alokasi Umum	15,67
Dana Alokasi Khusus Fisik	18,3
Dana Otonomi Khusus	0,509
Dana Keistimewaan DIY	0,2
Dana Desa	2

Sumber: Instruksi Presiden No.1/2025

Adapun akibat pemangkasan tersebut sedikit berdampak pada capaian realisasi alokasi TKD pada periode Februari tahun 2025. Gambar 4 menunjukkan bahwa meskipun target TKD tetap tinggi, persentase realisasi mengalami sedikit koreksi dibanding 2024. Pada Februari 2025, realisasi TKD mencapai Rp136,6 triliun, sedikit lebih tinggi dari 2024 (Rp134,68 triliun), tetapi persentase realisasi turun dari 17,75% pada 2024 menjadi 16,57% pada 2025. Hal ini menunjukkan perlambatan pencairan dana transfer, yang dapat berdampak pada keterlambatan belanja daerah dan implementasi program-program pemerintah.

Gambar 4. Realisasi Alokasi Transfer ke Daerah Periode Januari-Februari Tahun 2019-2025 (Rupiah Triliun)



Sumber: Kementerian Keuangan, 2025

Dengan adanya pemangkasan anggaran hingga 50% ini, pemerintah daerah diharuskan melakukan penyesuaian dalam pengelolaan keuangannya, yang berisiko memperlambat progres pembangunan serta menurunkan kualitas layanan publik yang tersedia bagi masyarakat. Berikut beberapa dampak dari adanya pemangkasan alokasi TKD ini:

a. Dampak terhadap Penyediaan Pelayanan Publik

Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp18,3 triliun dapat menghambat proyek-proyek infrastruktur di daerah, seperti pembangunan jalan dan jembatan. Secara rinci, pemangkasan DAK fisik ini menyasar bidang konektivitas sebesar Rp14,59 triliun, bidang irigasi sebesar Rp1,72 triliun, bidang pertanian sebesar Rp675,3 miliar, serta bidang pangan akuatik sebesar Rp1,3 triliun.

Pemerintah daerah yang sangat bergantung pada DAK Fisik untuk belanja modal akan menghadapi tantangan dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut. Kondisi ini tidak hanya memperlambat konektivitas antarwilayah, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah yang sangat bergantung pada investasi infrastruktur. Pemotongan dana transfer daerah hingga 50 persen berpotensi menyebabkan banyak layanan publik tidak dapat berjalan secara optimal. Berbagai proyek pembangunan strategis pun berisiko terbengkalai. Dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dalam jangka menengah hingga panjang, pemangkasan anggaran transfer daerah dapat berdampak negatif terhadap produktivitas dan efisiensi ekonomi nasional (Samirin dalam Putra, 2025).

Pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp15,67 triliun dapat mempengaruhi belanja daerah yang telah ditentukan peruntukannya, termasuk untuk sarana prasarana kelurahan dan pembayaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Hal ini juga berpotensi mengurangi

kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah, karena keterbatasan anggaran untuk operasional dan pengembangan fasilitas.

b. Dampak terhadap Stabilitas Ekonomi dan Sosial

Pengurangan belanja daerah akibat pemangkasan TKD berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama karena belanja pemerintah selama ini menjadi salah satu pendorong utama aktivitas ekonomi lokal. Dengan adanya pemotongan, beberapa program bantuan sosial dan subsidi daerah juga terancam berkurang, sehingga meningkatkan tekanan ekonomi bagi kelompok masyarakat miskin. Ketimpangan antar-daerah juga diprediksi meningkat. Kota-kota besar dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi seperti Bandung dan Surabaya dapat mengatasi pengurangan TKD dengan sumber pendapatan lain, tetapi daerah dengan PAD rendah akan mengalami kesulitan. Hal ini berisiko memperlebar kesenjangan pembangunan antara daerah maju dan daerah tertinggal (Askar et al., 2025).

c. Dampak terhadap Stabilitas Politik

Pemangkasan anggaran daerah berpotensi menimbulkan dampak politik yang signifikan, terutama dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Askar et al (2025) menyampaikan bahwa jika daerah merasa diperlakukan tidak adil dalam kebijakan fiskal, dapat timbul resistensi politik atau desakan untuk melakukan perubahan kebijakan. Hal ini semakin diperparah dengan meningkatnya ketidakpercayaan tokoh-tokoh daerah terhadap keberpihakan pemerintah pusat, terutama di wilayah yang rentan terhadap konflik. Selain itu, kebijakan pemotongan anggaran juga bertentangan dengan prinsip desentralisasi, di mana seharusnya pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal. Berkurangnya kemandirian fiskal ini dapat menggerus otoritas kepala daerah dalam menyusun kebijakan, karena semakin banyak pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, daerah mengalami keterbatasan dalam menjalankan program-program strategis yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat.

III. Kebijakan Efisiensi Anggaran di Negara Lain

1. Efisiensi Anggaran Argentina: Keberhasilan dan Dampak Sosial

Presiden Argentina, Javier Milei, menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara agresif untuk mengatasi inflasi 211% dan defisit fiskal yang berlangsung selama 14 tahun. Strategi "Chainsaw" mencakup penghapusan 18 kementerian, pemberhentian 30.000 pegawai negeri, dan pembentukan Kementerian Deregulasi dan Transformasi Negara guna meningkatkan efisiensi birokrasi (Iswara, A. J., 2025; Elliott, L. 2025). Hasilnya, dalam 10 bulan, Argentina mencapai surplus fiskal dan menekan inflasi hingga 93,6%, dengan inflasi tahunan turun ke 117,8% pada Desember 2024 serta pertumbuhan ekonomi mulai pulih. Namun, kebijakan ini berdampak pada peningkatan angka kemiskinan menjadi 53%, naik 11 poin persentase, menunjukkan bahwa efisiensi fiskal tanpa mitigasi sosial dapat memperburuk kesejahteraan kelompok rentan (Iswara, A. J., 2025).

Pengalaman Argentina ini kontras dengan Indonesia, di mana pemangkasan anggaran tidak diiringi dengan perampangan birokrasi, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Adapun pelajaran yang dapat diperoleh dari kebijakan efisiensi di Argentina, antara lain:

- Efisiensi fiskal harus diimbangi dengan perlindungan sosial untuk meminimalkan dampak pada masyarakat miskin.
- Pemangkasan birokrasi perlu dilakukan secara bertahap agar tidak menimbulkan guncangan sosial-ekonomi.
- Stabilitas makroekonomi harus selaras dengan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar mengejar surplus anggaran.

2. Efisiensi Anggaran Vietnam: Keberhasilan dan Tantangan Sosial

Presiden Vietnam menerapkan reformasi birokrasi besar-besaran untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini mencakup pengurangan jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, serta rencana pemangkasan 20% pegawai negeri dalam lima tahun ke depan. Langkah ini diperkirakan dapat menghemat Rp72,5 triliun dan meningkatkan efektivitas pemerintahan (Adit, A dan Iswara, A. J, 2025). Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi fiskal, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran, terutama dalam pelayanan publik dan stabilitas sosial. Pengurangan kementerian dapat menghambat birokrasi, sementara pemutusan hubungan kerja massal dapat meningkatkan pengangguran di sektor publik (Abduruohman, I. 2025). Berdasarkan pengalaman dari Vietnam tersebut, terdapat beberapa pelajaran yang dapat dipetik:

- Reformasi birokrasi harus diimbangi dengan mitigasi dampak sosial, seperti program transisi bagi pegawai yang terdampak.
- Efisiensi fiskal tidak boleh mengorbankan layanan publik, terutama sektor yang berdampak langsung pada masyarakat.
- Peningkatan investasi di sektor produktif dapat menjadi strategi jangka panjang untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap stabil.

Pengalaman Vietnam menunjukkan bahwa efisiensi anggaran dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas fiskal, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, dapat menimbulkan tantangan sosial dan ekonomi yang signifikan.

IV. Strategi dalam Menghadapi Kebijakan Efisiensi Anggaran

Kebijakan efisiensi anggaran harus dilaksanakan dengan cermat dan selektif, memastikan bahwa pemotongan anggaran tidak mengorbankan sektor-sektor yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pengurangan belanja pada sektor-sektor strategis dan memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak kontraproduktif terhadap tujuan pembangunan nasional. Pendekatan yang seimbang antara efisiensi fiskal dan stimulasi ekonomi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Pendekatan yang disesuaikan di setiap sektor diperlukan agar

pemangkasan anggaran tidak mengurangi kualitas layanan dan pencapaian target Pembangunan. Strategi tersebut di antaranya mencakup:

1. Sektor Infrastruktur. Pemerintah perlu memprioritaskan proyek infrastruktur dengan dampak ekonomi terbesar, serta mengoptimalkan skema Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) untuk menjaga kelangsungan proyek strategis di tengah keterbatasan APBN. Pengawasan ketat dan peningkatan efisiensi pelaksanaan proyek juga diperlukan untuk mencegah pemborosan anggaran.
2. Sektor Kesehatan. Anggaran diprioritaskan pada layanan kesehatan primer yang berdampak langsung bagi masyarakat. Optimalisasi sumber daya melalui integrasi sistem layanan kesehatan diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi sosial dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama di daerah terpencil.
3. Sektor Pendidikan. Pemerintah harus memprioritaskan program berdampak luas, seperti bantuan operasional sekolah berbasis kinerja, digitalisasi pendidikan, dan pelatihan guru yang tepat sasaran. Keterlibatan sektor swasta dalam penyediaan sarana pendidikan melalui skema CSR atau kemitraan publik-swasta juga dapat membantu mengurangi tekanan anggaran.

Optimalisasi kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus memastikalayanan publik tetap berjalan optimal. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi:

1. Prioritas pada Belanja Esensial. Anggaran harus difokuskan pada program strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar, sementara program non-prioritas dapat dikurangi.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meningkatkan PAD melalui reformasi pajak daerah, digitalisasi layanan, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif guna memperkuat sumber pendapatan lokal.
3. Efisiensi Operasional. Evaluasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam layanan publik dapat mengurangi pemborosan anggaran tanpa menurunkan kualitas layanan.
4. Kolaborasi Antar Daerah. Sinergi dalam penyediaan layanan publik dan pembangunan infrastruktur bersama dapat meningkatkan efisiensi pembiayaan, terutama untuk proyek skala besar yang melintasi batas administratif.
5. Transparansi dan Partisipasi Publik. Tata kelola anggaran yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan serta pengawasan akan memastikan kebijakan lebih tepat sasaran dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.

V. Penutup

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan penting dalam pengelolaan keuangan negara guna memastikan kesinambungan fiskal serta pengelolaan APBN yang lebih sehat dan berkelanjutan. Namun, implementasi kebijakan ini

membawa implikasi luas terhadap perekonomian nasional maupun daerah. Dari aspek ekonomi makro, efisiensi anggaran dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat konsumsi masyarakat, hingga investasi yang pada gilirannya berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara umum.

Di sektor strategis, pemangkasan anggaran berisiko memperlambat pembangunan infrastruktur, membatasi akses pendidikan, dan menurunkan kualitas layanan kesehatan. Selain itu, pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dapat menghambat pembangunan daerah, memperbesar kesenjangan antarwilayah, dan mengganggu pemerataan pembangunan.

Untuk memitigasi dampak tersebut, diperlukan optimalisasi belanja pada program prioritas, penguatan kemitraan pemerintah-swasta, serta efisiensi berbasis kinerja. Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan legislatif, khususnya Komisi XI DPR RI, menjadi kunci dalam memastikan efisiensi anggaran tetap mendukung kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi. Dengan strategi yang tepat dan sinergi yang kuat, efisiensi anggaran dapat berjalan tanpa menghambat pembangunan dan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional serta daerah.

Daftar Pustaka



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**

*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

**20
25**

**ANALISIS
RINGKAS
CEPAT**